

KEBIJAKAN KESEHATAN TENTANG UPAYA PENURUNAN AKI DAN AKB, SERTA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



NAMA KELOMPOK :

Lisa Anggun 202020100003

Puput Prihandini 202020100030

Hermin Oknanin 202020100064

Emalia Putri 202020100073



RINGKASAN EKSEKUTIF

Angka kematian ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur status kesehatan ibu pada suatu wilayah. Penyebab tingginya kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh tidak terlaksananya pemeriksaan continuity of care pada ibu selain itu timbulnya penyulit persalinan yang tidak dapat segera ditangani.

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Jika gizi tidak dicukupi dengan baik akan berdampak pada hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, perkembangan otak yang tidak maksimal yang dapat mempengaruhi kemampuan mental dan belajar tidak maksimal, serta prestasi belajar yang buruk.

MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI INDONESIA



Pemerintah terus berupaya menurunkan angka *stunting* di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi *stunting* nasional pada 2021 mencapai 24,4 persen, atau melebihi batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni di bawah 20 persen.

APA ITU STUNTING?

Kondisi gagal pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak balita akibat kekurangan gizi sejak di dalam kandungan, yang ditandai dengan tubuh lebih pendek/kerdil dibandingkan anak seusianya.

ANGKA PREVALENSI STUNTING DI INDONESIA

(Data Kemenkes, Desember 2021)



PROVINSI DENGAN BALITA STUNTING TERBANYAK



UPAYA PEMERINTAH



Memberi tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri.



Memberi tambahan makanan/suplemen kepada ibu hamil/menyusui.



Mengaktifkan kembali Posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak.



Sosialisasi intensif mengenai gizi dan *stunting* kepada masyarakat.



Memperkuat sistem pendataan agar lebih akurat.



Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, air bersih dan sanitasi yang layak, terutama bagi ibu hamil/menyusui dan balita.



Memperkuat koordinasi seluruh pihak terkait penanganan *stunting*.



PENDAHULUAN

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih Tinggi



Penyebab Tingginya AKI

- Ibu mengidap hipertensi.
- Terjadinya pendarahan saat melahirkan.

Upaya Kementerian Kesehatan

- Mengampanyekan pencegahan dan pengobatan dini untuk ibu hamil yang mengidap hipertensi.
- Mendistribusikan alat USG ke puskesmas di perdesaan.

Saat ini, penurunan AKI dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi prioritas program kesehatan di Indonesia. Bidan sebagai pemberi asuhan kebidanan memiliki posisi strategis untuk berperan dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB. Paradigma baru dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak yaitu dengan asuhan secara berkesinambungan. Asuhan secara berkesinambungan diberikan agar kejadian AKI dan AKB dapat ditekan karena komplikasi selama kehamilan sampai masa nifas terdeteksi sedini mungkin (Kemenkes RI, 2015). Pada saat ini, Indonesia masih menangani berbagai macam permasalahan kesehatan yang berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu permasalahan kesehatan yang menjadi fokus pemerintah di Indonesia adalah stunting. Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO.

TELAAH KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN

Analisis SWOT

Hal yang menjadi kekuatan (Strength) dalam program Kebijakan Kesehatan tentang Upaya penurunan AKI dan AKB, serta percepatan penurunan stunting diantaranya:

1. Komitmen tinggi dalam pencapaian program prioritas nasional
2. Pembiayaan semakin meningkat
3. Regulasi sudah mendukung program kesehatan masyarakat
4. Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih yang cukup
5. Pemanfaatan informasi dan teknologi meluas

Hal yang menjadi kesempatan (opportunity) dalam program Kebijakan Kesehatan tentang Upaya penurunan AKI dan AKB, serta percepatan penurunan stunting diantaranya:

1. Dukungan lintas sector/K/L
2. Pengelolaan anggaran sudah semakin efektif, efisien dan transparan
3. Komitmen global bidang kesehatan
4. Otonomi daerah
5. Kebijakan SPM daerah
6. Banyaknya inovasi program kesehatan di daerah
7. Banyaknya tersedia dana untuk kesehatan dari lintas sektor (dana desa)
8. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat

Hal yang menjadi kelemahan (weakness) dalam program program Kebijakan Kesehatan tentang Upaya penurunan AKI dan AKB, serta percepatan penurunan stunting diantaranya

1. Distribusi dan kompetensi SDM belum memadai
2. Kurang optimalnya penyerapan anggaran
3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4. Kurangnya pelatihan SDM
5. Beban kerja yang berlebihan
6. Lemah dalam kepatuhan pada standar program
7. Pemantauan program belum memadai
8. Belum terintegrasinya sistem informasi kesehatan
9. Perencanaan internal program belum optimal

Hal yang menjadi ancaman (threat) dalam program program Kebijakan Kesehatan tentang Upaya penurunan AKI dan AKB, serta percepatan penurunan stunting diantaranya kesehatan masyarakat diantaranya :

1. Tingginya kematian ibu, bayi dan masalah gizi
2. Pergeseran gaya hidup
3. Pergeseran pola penyakit
4. Tingginya ego program dan ego sektor
5. Perencanaan program pusat dan daerah belum sinkron
6. Pemanfaatan dana operasional kesehatan masih focus pada pengadaan
7. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang rumit
8. Kebijakan kepala daerah yang belum mendukung prioritas nasional kesehatan
9. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia belum berkualitas
10. Rendahnya perilaku masyarakat hidup sehat

1 DARI 3 BALITA INDONESIA DERITA STUNTING

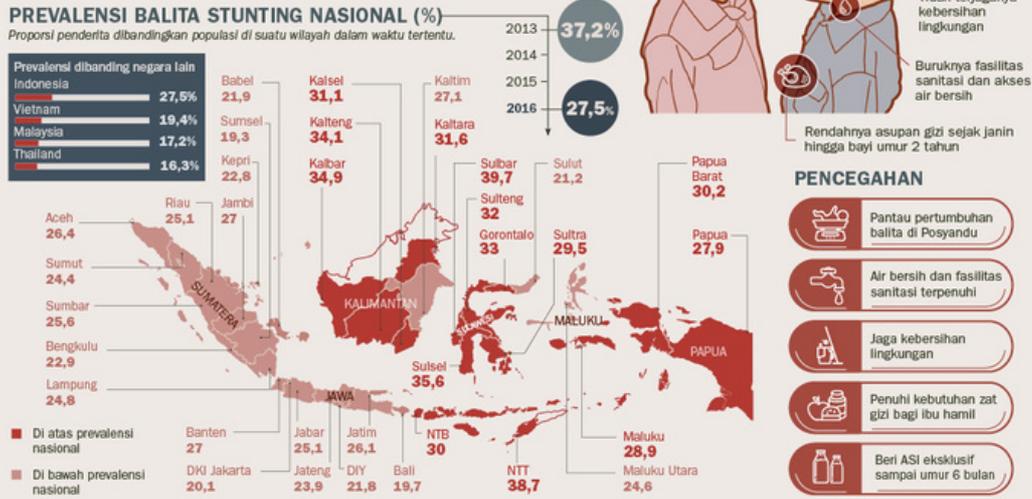
Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Umumnya penderita rentan terhadap penyakit, kecerdasan di bawah normal, serta produktivitas rendah. Menurut standar WHO, suatu wilayah dianggap kronis jika prevalensinya di atas 20%.

KATA DATA
ekonografik

PREVALENSI BALITA STUNTING NASIONAL (%)

Proporsi penderita dibandingkan populasi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.

Prevalensi dibanding negara lain	Prevalensi (%)
Indonesia	27,5%
Vietnam	27,5%
Malaysia	19,4%
Thailand	17,2%
Thailand	16,3%



PENYEBAB

Tidak terjaganya kebersihan lingkungan

Buruknya fasilitas sanitasi dan akses air bersih

Rendahnyanya asupan gizi sejak janin hingga bayi umur 2 tahun

PENCEGAHAN

- Pantau pertumbuhan balita di Posyandu
- Air bersih dan fasilitas sanitasi terpenuhi
- Jaga kebersihan lingkungan
- Penuhi kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil
- Beri ASI eksklusif sampai umur 6 bulan

SUMBER: MCAL, KEMENKES (PSG 2016), UNICEF | NASKAH: TITA ADELIA | DESIGN: CICILIA BINTANG | ILUSTRASI: BETARIA SARULINA

PERMASALAHAN

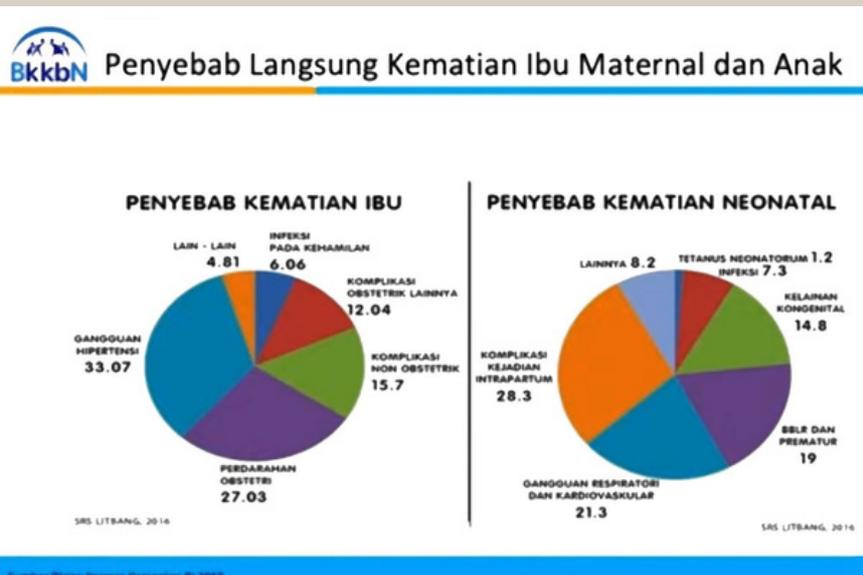
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih jauh dari harapan yang ingin dicapai selain itu angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) juga dipengaruhi dan didorong dari berbagai faktor timbulnya risiko kematian maternal dan neonatal. Selain itu ada beberapa faktor penyakit, masalah gizi dari wanita usia subur (WUS) serta faktor 4 T (terlalu muda dan terlalu tua untuk hamil dan melahirkan, terlalu dekat jarak kehamilan/ persalinan dan terlalu banyak hamil dan melahirkan). Dampak tersebut lebih diperparah lagi dengan terjadinya kesenjangan k1 dan k4, kurangnya dukungan dari suami atau keluarga, abortus dan mengalami anemia zat besi.

Pencapaian program pencegahan stunting, masih tertinggal jika kita bandingkan dengan negara lain, yang memiliki ekonomi setara di kawasan Asia Tenggara. Prevalensi stunting pada anak dibawah dua tahun (baduta) pada tahun 2018 masih berada pada angka 29,9% (meleset dari target RPJMN 2015-2019 sebesar 28%). Sedangkan, prevalensi stunting anak di bawah lima tahun (balita) masih berada pada angka 30,8% pada Riskesdas 2018 dan pada tahun 2019 jumlah angka stunting di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,1% menjadi 27,67% (Kemenkes RI, 2019)

REKOMENDASI

Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi salah satunya adalah pentingnya memberikan asuhan secara berkelanjutan (Continuity of Care), diantaranya ibu harus periksa minimal 4 kali selama 6 hamil, kunjungan nifas 4 kali, dan dilakukannya serangkaian pemeriksaan laboratorium untuk mencegah halhal buruk yang bisa mengancam janin antara lain pemeriksaan Hb, glukosa, HBsAg, VDRL dan TPHA, HIV, protein urine, golongan darah, albumin. Dan pada kunjungan neonates dan konseling KB.

Agar implementasi intervensi penurunan stunting terintegrasi dapat berhasil dengan baik sampai ke level desa/kelurahan, maka diperlukan strategi kebijakan berupa :

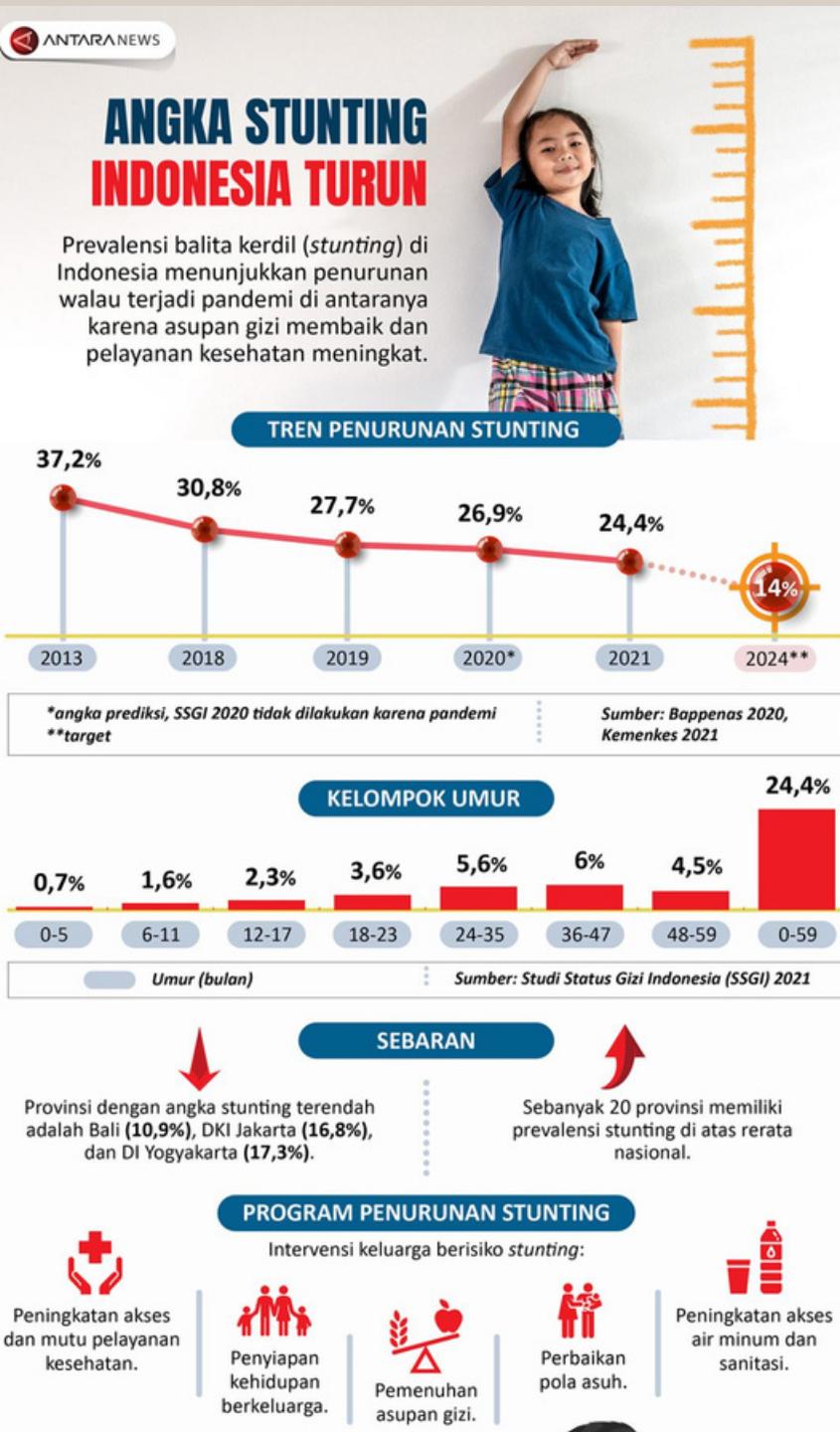


1. Membangun mindset di masyarakat bahwa anak pendek (stunting) sebagai masalah kesehatan, melalui : intervensi KIE berkesinambungan sampai di level desa melalui berbagai cara dan beragam saluran.

2. Peningkatan kapasitas SDM di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam melakukan analisis penyebab stunting dan penyusunan program penanggulangannya, dengan cara:

- Meningkatkan kemampuan pemangku program di OPD Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa melalui pelatihan atau pendampingan dari perguruan tinggi pada saat kegiatan analisis permasalahan dan penyusunan program intervensi.
- Bappeda perlu mengawal agar setiap pengusulan program/intervensi harus didasarkan pada hasil kajian analisis masalah yang benar dan tepat.





3. Mendorong program intervensi penanggulangan stunting menjadi salah satu prioritas program di desa/kelurahan, dengan cara:

a. Pembentukan kader stunting atau kader pembangunan manusia yang khusus membantu menangani masalah gizi (*stunting*) di desa/kelurahan dengan didukung dana operasional dari APBD atau APBDes.

b. Mendorong terbitnya peraturan bupati yang dapat menjadi pijakan dan mengikat seluruh komponen OPD di kabupaten sampai ke pemerintahan desa untuk memberi prioritas anggaran untuk penanggulangan stunting dan menjadikan luaran gizi sebagai tolok ukur keberhasilan intervensi gizi spesifik dan sensitive, bukan hanya sebatas terlaksananya kegiatan/projek

c. Pemerintah daerah (melalui Bappeda) perlu mengawal agar program intervensi penanggulangan stunting terintegrasi masuk dalam APBD dan APBDes dengan anggaran yang memadai.

d. Pemerintah desa perlu didampingi agar mampu melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program pembangunan desa untuk mendukung penanggulangan stunting, serta jika diperlukan dituangkan dalam peraturan desa.